



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN TUGAS WAKIL BUPATI DALAM MEMBANTU  
BUPATI MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN  
2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2016-2018)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**SAYYID AMAL FADHLI LR  
(11527104229)**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASYM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Dalam Membantu Bupati Menyelenggarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016- 2018)*, yang ditulis oleh :

Nama : Sayyid Amal Fadhli LR  
 NIM : 11527104229  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 April 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2021 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Api Syahrin, SH., MH**

Penguji I  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji II  
**Peri Firmansyah, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 196803 1 005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ARSTRAK**

***Sayyid Amal Fadhli LR (2020): Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam Membantu Bupati Menyelenggarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018)***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai pelaksanaan tugas wakil Bupati yang tidak berjalan maksimal dimana dalam kepemimpinan mereka terjadi disharmonisasi pada tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2018 di Kabupaten Labuhanbatu padahal tugas dan Kewenangan Wakil Bupati sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam membantu Bupati menurut Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018 dan bagaimana Hambatan dan masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat lapangan, metode dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang tugas dan kewenangan Wakil Bupati, hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu menurut Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang pemertitahan daerah tidak berjalan dengan maksimal, hal ini yang menyebabkan terjadinya Pecah Kongsi dalam pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu pada Priode 2016-2018. Sedangkan Hambatan Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah 1) Kepala Daerah sangat minim memberikan kewenangan dan lemahnya Posisi wakil Bupati dalam pemerintahan, 2) Kurang baiknya Hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, 3) Tidak adanya ketegasan soal Pembagian Kewenangan Tugas Bupati dan Wakil Bupati.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatul&hi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada, Allah SWT yang dengan rahmat dan karuniaNya kepada, penulis, sehingga, dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Dalam Membantu Bupati Menyelenggarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018)”***. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga terang benderang seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan untuk:

1. Ayahanda Drs. Lahmuddin Rambe, AR, M.Si beserta Ibunda Yurianti Harahap, S.Pdi, Adinda Fathur Rezki Mubarak LR, Adinda Muhammad Irham Ramadhan LR, Adinda Nasywah Syakiroh Muthmainnah LR beserta keluarga besar Hasayangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu berkorban baik jiwa dan raga, moril dan materil untuk selalu mencintai dan memperjuangkan ananda agar selalu menjadi orang yang berguna bagi Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara serta selalu memberikan nasehat dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi agar selalu sukses dunia terlebih akhirat.

2. Bapak PLT Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. Suyatno, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Wakil Rektor II Dr. H. Kusnadi, M. Pd., dan Wakil Rektor III Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Dr. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M. Ag dan. Wakil Dekan III Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak Firdaus, SH.,MH selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah banyak membantu Perkuliahan serta Proses Pengajuan Judul Skripsi.
5. Ibuk Lysa Anggralm, SH,MH Selaku Penasehat Akademik yang selalu banyak membantu memberikan saran serta arahan selama Proses Perkuliahan.
6. Bapak Syafrinaldi, SH.,MA Selaku Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan pengarahan dan petunjuk sejak dari awal sampal selesal karya ilmiah ini.
7. Kepada semua Bapak dan Ibuk Dosen serta Civitas Akademika yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh teman-teman Mahasiswa yang Kuliah di UIN Suska Riau baik di Jurusan Ilmu Hukum B, Konsentari Hukum Tata Negara D serta. Terkhusus



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kiki Afrinaldi, SH., Syandatul Latif, SH., Andri Halomoan Nasution, SH., Hamka SH., Raja Shinta Dahlia Fatmawati, SH., Rita Sianipar, SH., Robi Suandy, SH., Ali Akbar.

9 Teman-Teman Muhammad Syahdan, Ahmad Maulana Mubarak, Yazid Fudhoil, Ali Imron, S,Ikom., Humaira Dinda Pratiwi, Muhammad Rifki Wildan Siregar, Fadhlah Gerald, Nur Fadhilah, bang Hendra Putra Siregar dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran kepada Penulis dalam pembuatan Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi Pembaca dan dapat membutuhkan bagi kita semua dan semoga Allah senantiasa selalu memberkahi kehidupan kita semua, Aamiin ya RobbaWalamin.

Pekanbaru, Januari 2021

Penulis

**Sayyid Amal Fadhli LR**  
NIM. 11527104229

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Batasan Masalah .....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu .....	21
B. Kondisi Georafis dan Demografis.....	26
C. Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu .....	32
D. Kondisi Pendidikan .....	33
E. Kondisi Ekonomi .....	34
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pemerintahan Daerah .....	35
B. Kewenangan.....	53
C. <i>Good Governance</i> .....	58
D. Tugas dan Wakil Kepala Daerah .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam membantu Bupati menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018? .....	62
B. Hambatan dan Masalah dalam Pelaksanaan Tugas dan	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wewenang Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu	
Priode 2016-2018.....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran. ....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pribadi H. Pangonal Harahap, SE, MSi dan H. Andi Dalimunthe ST, MT.....	4
Tabel I.2	Tugas Bupati dan Wakil Bupati.....	5
Tabel I.3	Data Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pecah Kongs” antara tahun 2005 hingga 2013.....	10
Tabel I.4	Populasi dan Sampel .....	18
Tabel II.1	Nama-Nama Bupati Labuhanbatu.....	26
Tabel II.2	Luas Kecamatan dan Rasio Kecamatan terhadap luas Kabupaten Labuhanbatu.....	28
Tabel II.3	Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018.....	30
Tabel II. 4	Populasi Suku Bangsa Menurut Kecamatan Tahun 2018 .....	31
Tabel II.5	Populasi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut per-Kecamatan Tahun 2018.....	31
Tabel II.6	Sarana Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018....	33
Tabel II.7	Klasifikasi Penduduk Berdasaekan Perekonomian Tahun 2018.....	34

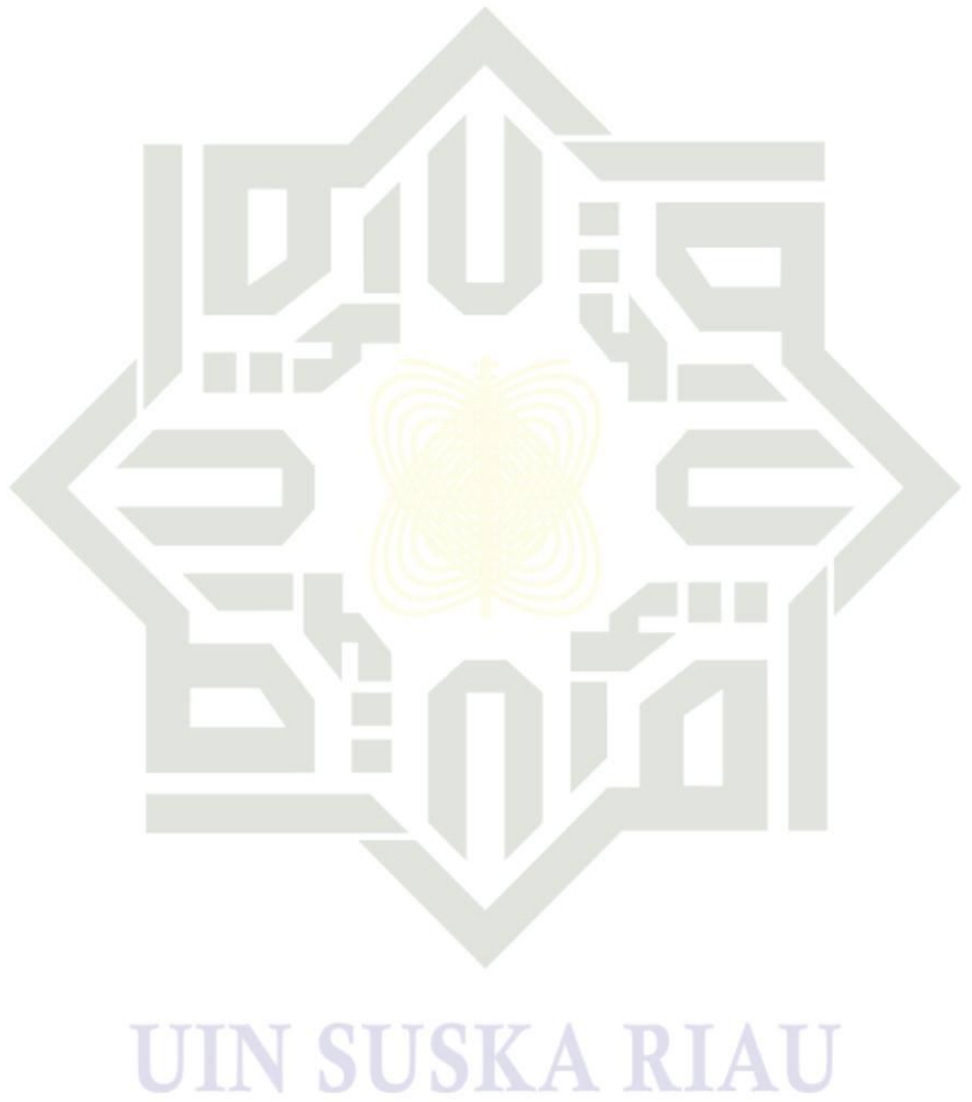


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu .....	27
--	----





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepala Daerah merupakan seseorang yang diberi amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Kepala Daerah sebuah provinsi disebut dengan Gubernur, untuk sebuah kota kepala daerahnya disebut dengan Wali Kota dan untuk sebuah kabupaten disebut dengan Bupati. Setiap daerah terdapat satu pemimpin atau Kepala Daerah dan dibantu satu orang wakilnya.

Pemimpin daerah selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan model Pemilihan yang bersifat langsung dan menjalankan amanah rakyat. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diibaratkan sebagai pasangan yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik dalam hal pengelola maupun pemegang kuasa kepemimpinan di daerah hal ini sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Tugas utama seorang Kepala Daerah adalah memimpin dan bertanggung jawab secara penuh dalam penyelenggaraan segala sesuatu hal yang berjalan di daerah. Seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berpikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerah dibanding kepentingan pribadi maupun golongan. Kepala Daerah harus

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersikap netral, jujur, arif, bijaksana serta adil dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi tata aturan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.

Wakil Kepala Daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memegang pimpinan kebijakan politik polisionil di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis yaitu dapat dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pengisian keanggotaannya melalui Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota sebagai Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur, oleh karena itu pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta pengisian dan pemberhentian jabatan Wakil Kepala Daerah diserahkan kepada Undang-Undang.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang ini membawa implikasi baru

<sup>2</sup> C. S. T, Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 390.

<sup>3</sup> Wilda Prihatiningtyas, "Konstitusionalitas model pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA)", *Jurnal Universitas Airlangga Media Liris* Vol. I No2., Juni 2018, h. 380

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada sistem pemerintahan yang berubah dengan memberikan otonomi luas pada daerah masing-masing. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pernerintah Daerah yang melahirkan paham desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan landasan hukum bagi kekuasaan pemerintah daerah yang memberi ruang bagi kehadiran jabatan wakil kepala daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.<sup>5</sup>

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan politis dan pengisian jabatannya dipilih langsung satu paket dengan kepala daerah yang jumlah lah wakil kepala daerah adalah satu orang, baik dari kader partai politik maupun non partai politik (perseorangan), sedangkan pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan, sebagian lagi diserahkan pengaturannya kepada kepala daerah dengan persetujuan wakil kepala daerah. UndangUndang No. 32 Tabun 2004 jo Undang-Undang No. 12 Tabun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah pun mengisyaratkan hat yang sama, yaitu

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 Pasal I Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>5</sup> J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, ( Jakarta. Sinar Grafika, 2009), h. 35



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui keberadaan wakil kepala daerah dalam satu paket dengan kepala daerah. Perbedaannya hanya terletak pada proses pemilihannya, dimana kepala daerah dan wakilnya tidak lagi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melainkan dipilih langsung oleh rakyat guna mengurus Pemerintahan Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Kabupaten Labuhanbatu adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatra Utara dimana pada Priode 2016-2018 wilayah ini dipimpin oleh Bupati H. Pangonal Harahap, SE., M.Si dan Wakil bupati dipimpin oleh H. Andi Dalimunthe, ST., MT. Merekadilantik pada 17 Februari 2016. Tabel di bawah ini adalah data pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dan Tugas dan Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel I.1<sup>7</sup>**  
**Data Pribadi H. Pangonal Harahap dan H. Andi Dalimunthe**

No.	Kategori	Bupati	Wakil Bupati
1.	Nama Lengkap	H. Pangonal Harahap, SE, Msi	H. Andi Suhaimi Dalimunthe ST, MT.
2.	Tempat Tanggal Lahir	Batang Gogar, 25-10-1969	Rantau Prapat, 19-05-1972
3.	Riwayat Pendidikan	1. SD Negeri Nomor 112257 Batang Gogar Kec. Sei. Kanan 2. MTSN Medan 3. MAN Padang Sidempuan 4. STIF Labuhanbatu 5. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia	1. SD Negeri Nomor 112143 Rantau Prapat 2. SMPN 2 Rantau Prapat 3. STM PEMDA Rantau Prapat 4. Institut Teknologi Medan

Sumber: KPU Kabupaten Labuhanbatu 2015

<sup>6</sup> Yeyet sholihat, "Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Karawang", Jurnal Ilmiah Politikom Indonesians Volume 1 Nomor 2, 2016, h. 134

<sup>7</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu 2015

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.2<sup>8</sup>**  
**Tugas dan Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati**

<b>Bupati</b>	<b>Wakil Bupati</b>
Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Membantu Bupati dalam : memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD, RPJPD dan RKPD bersama DPRD	Membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan
Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung Jawaban APBD kepada DPRD	Membantu Bupati dalam : memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten
Ketua FORKOPIMDA Kabupaten (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)	Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Perinendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).	Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjahil masa tahanan atau berhalangan sementara
Ketua KOMINDA (Komunitas Daerah) Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.	Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Wewenang Bupati mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD menetapkan Peraturan dan Keputusan Bupati	Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Penanggung jawab Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten (Permendagri Nomor 13 Tahun 2010)
Melaksanakan Tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>8</sup> Kementrian Dalam Negeri Tahun 2014

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara Esensial, demokrasi merupakan pelaksanaan, bukan hanya pengakuan atas persamaan hak, kewajiban, dan kesepakatan (*equal might, obligation, and oppurtunuty*), akan tetapi pelaksanaan persamaan hak, kewajiban, dan kesepakatan, sehingga demokrasi haruslah hadir sebagai sebuah konsep yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan individu dan pluralitas kelompok didalam masyarakat. Dengan kata lain demokrasi berupaya untuk menciptakan persamaan hak, kewajiban, dan kesempatan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>9</sup>

Seorang kepala daerah dan wakilnya harus mampu bersinergi dan harmonis dalam hal berfikir, bertindak dan bersikap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, masyarakat daerah ketimbang kepentingan pribadi maupun golongan. Kepala daerah dan wakilnya harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat atau tindakan-tindakan kepala dan wakil kepala daerah harus memenuhi aturanaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah telah mengalami banyak perubahan guna mewujudkan pemerintahan daerah yang ideal dimulal dan' adanya undang-undang Nomor 1 Tabun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tabun 1965, undang-undang Nomor 5 Tabun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tabun 2004, Undang-Undang No 12 Tabun 2008 lalu Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 yang diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 sebagaimana telah diubah

<sup>9</sup> Hari Sabandono, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h.26

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Menjadi Undang-undang yang mana memuat dalam Pasal 66 yaitu :

1. Wakil Kepala Daerah mempunyai Tugas :
  - a. Membantu kepala daerah dalam urusan:
    - 1) Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
    - 2) Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
    - 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
    - 4) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/walikota;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan
  - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
4. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.<sup>11</sup>

Didalam Pemerintahan masa Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu terjadi disharmoni pada Tahun kedua Kedua Kepimpinan mereka dimana Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati yang seharusnya Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan, mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tidak diberikan oleh Kepala Daerah ketika menjabat dikarenakan adanya Monopoli Kekuasaan hal ini tentunya melanggar ketentuan perundang-undangan Pemerintahan daerah. Ketika menjabat Wakil Kepala Daerah juga harusnya melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya melalui keputusan kepala daerah tidak pernah juga diberikan oleh kepala daerah justru semua tugas wakil bupati diker akan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Bupati sedangkan Wakil Bupati bisa

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan lebih parah dari ban serap. Hal ini menjadi ironi yang menjadi pemicu retaknya hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga berujung pada tingkat permusuhan dan menggalang kekuatan masing-masing yang tentunya berdampak pada kinerja pemerintahan daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

Perjalanan hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah wring menimbulkan konflik hingga ketidakharmonisan. Berkurangnya keharmonisan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu contoh ketidakharmonisan yaitu antara Bupati dan Wakil Bupati *Incumbent* dalam Pemilihan Kepala Daerah di Sidoarjo. Ketidakharmonisan juga terjadi antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2008-2013. Ketidakharmonisan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut terjadi karena pembagian tugas dan wewenang yang tidak melibatkan Wakil Gubernur dalam pembuatan berbagai kebijakan. Kepemimpinan satu paket terbukti mengandung unsur yang dapat menyebabkan disharmonisasi. Berdasarkan beberapa penelitian tentang disharmonisasi antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah menunjukkan masalah yang cukup tinggi terjadi di Indonesia.<sup>12</sup>

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat data Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pecah kongsi antara tahun 2005 hingga 2013, mencapai jumlah 971 atau 94,64 persen.<sup>13</sup> Tabel di bawah ini

<sup>12</sup> Robert Antony S., *Disharmonisasi Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Periode 2008 - 2013*, Medan, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sumatera Utara 2014 H. 11

<sup>13</sup> Pamudji S, "Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik", UP Jakarta, Widyapraja No. 19, 1994 Tahun III. h. 43



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah data kategon pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut Kementerian Dalam Negeri tahun 2014:

**Tabel I.3<sup>14</sup>**  
**Data Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “Pecah Kongsi” antara tahun 2005 himma 2013**

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1.	Pecah Kongsi	971	94,64%
2.	Kompak	55	5,36%
	Total	1026	100%

*Sumber: Kementerian Dalam Negeri tahun 2014*

Hasil kajian Kementerian Dalam Negeri tersebut, Kepala Daerah yang tidak harmonis meliputi 57 pasangan. Gubernur dan Wakil Gubernur serta sebanyak 914 pasangan Bupati dan Wakil. Bupati serta pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 1026 pemilihan Kepala Daerah, hanya 55 pasangan Kepala Daerah yang tetap harmonis sampai akhir masa jabatannya dan kemudian mengikuti Pemilihan Kepala Daerah periode kedua.

55 pasangan Kepala Daerah meliputi 6 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 49 pasangan Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Hampir 95% Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pecah kongsi atau mengalami disharmonisasi ini mengisyaratkan bahwa hasil Pilkada belum menghasilkan pemimpin yang lebih solid dan berkualitas. Disharmonisasi pada pemimpin daerah tentu dapat mengganggu roda pemerintahan bahwa salah satu faktor pendorong peningkatan dan efektivitas kepemimpinan adalah hubungan yang harmonis.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Kementrian Dalam Negeri Tahun 2014

<sup>15</sup> Diakses melalui Taman: <http://www.rakyatpos.com/retaknya-kepemimpinan-kepala->

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disharmoni di Kabupaten Labuhanbatu pada priode 2016-2018 termasuk bagian dari Fenomena retaknya hubungan kepala daerah dengan wakil kepala daerah hat ini tentu bertentangan dengan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Kenyataan yang paling disayangkan, ketika mencuat konflik politik kepemimpinan tersebut, hal itu menyentuh ranah publik dan meluas kepada perpecahan dalam tubuh pemerintah daerah membuat urusan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi terabaikan akibat penyekatan dan pengaruh dari konflik tersebut padahal yang perlu disadari Keduanya sama-sama pejabat yang dipilih langsung dari masyarakat. Meski pembagian peran tersebut sebenarnya bergantung pada kesepakatan keduanya. Seiring dinamika politik di daerah, tak jarang kesepakatan itu sima. Selain itu, ketidaksejajaran pasangan kepala daerah ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dibuat daerah bersangkutan. Inilah bibit dari disharmoni kepala daerah dengan wakilnya.<sup>16</sup>

Menurut H. Hamamuddin Siregar bahwasanya memang benar tugas dari Wakil Bupati selama masa Kepimpinan priode 2016-2018 di laksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Juga melalui Asisten Bupati berdasarkan instruksi Bupati kepada Kepala Dinas dan Setiap Kepala Bagian untuk tidak banyak berinteraksi dengan wakil bupati dalam setiap kegiatan dan beliau mengatakan bahwasanya disharmoni antar kepala daerah juga telah terjadi pada masa Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya.<sup>17</sup>

daerah-wakil-kepala-daerah.html/ diakses pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 13.21 wib

<sup>16</sup> Pamudji S, "Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. IT Jakarta, Widyapraja No- 19, 1994 Tahun III h. 132

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak H. Hamamuddin Siregar., ST, Desember 2019 Kepala

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut H. Marwan Siregar bahwa antara Bupati dan Wakil Bupati akur pada 1 Tahun pertama saja setelahnya tidak ada lagi terbangun kerjasama yang baik padahal mereka dipilih oleh rakyat dipilih satu paket sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dimana mereka harusnya kompak, serasi dan harmonic dalam melaksanakan pemerintahan daerah hal ini terjadi karena peran dan fungsi wakil kepala daerah tidak diberikan kewenangan yang jelas oleh kepala daerah hal ini yang memicu ketidakhaimonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah padahal tugas dan wewenang wakil kepala daerah telah diatur dalam aturan pemerintahan daerah.<sup>18</sup>

Harmonisasi dalam kepemimpinan sangatlah penting terhadap jalannya pemerintahan di daerah terutama untuk masyarakat. Masyarakat tentu akan merasakan dampaknya terhadap proses pemerintahan yang terganggu akibat kurang kompaknya Kepala Daerah dengan Wakil Kepala didaerahnya.

Permasalahan hubungan kepemimpinan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah belum banyak dijadikan kajian oleh peneliti lain Setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang-Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini berfokus tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu pada priode 2016-2018.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana Labuhanbatu

<sup>18</sup> Wawancara dengan H. Marwan Siregar, Desember 2019 Tokoh Masyarakat Labuhanbatu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang belum pernah dijadikan kajian oleh peneliti lain.

Berdasarkan Latar Belakang yang uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Dalam Membantu Bupati Menyelenggarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016- 2018)”**

Berdasarkan judul diatas adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam membantu Bupati menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016- 2018?
2. Apa Hambatan dan Masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipennasalahkan maka penulis membateisi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan tugas Wakil Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pernerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018.

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan dapat memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam Membantu Bupati Menyelenggarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018
- b. Untuk Mengetahui Hambatan dan Masalah dalam Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat kelulusan kuliah untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat dan memiliki kegunaan bagi masyarakat umum khususnya dalam rangka pemahaman terhadap Tugas dan Kewenangan wakil Bupati dalam membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan.

### B. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan satu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum *empiris* atau penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sosiologis (*empiris*) dapat direalisasikan dengan meneliti

<sup>19</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Intilaim*, Jakarta. UI Press, 1981 H. 83



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>20</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>21</sup>

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian terhadap tugas wakil bupati dalam membantu bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana penelitian ini menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian Penelitian ini berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No.464, Kel. Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Rantau Prapat atau lebih khususnya itu dikantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu. Yang mana tempat ini dipilih karna

<sup>20</sup> Panduan Penyusimmi Skripsi, Pekanbaru (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU) h 8.

<sup>21</sup> Lexy L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat terjadinya masalah dalam penelitian ini.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis adalah kebijakan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi bisa berarti orang, benda, (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>22</sup>

Sampel adalah himpunan dari populasi. Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tepat untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>23</sup>

Populasi dan sampel. Populasi yang dimaksud adalah Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu dan penulis memakai cara pengambilan sampel *nonproportional stratified random sampling*<sup>24</sup> yaitu hanya mengambil 3 sampel saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

<sup>22</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2010), h.. 118

<sup>23</sup> Gempur santoso, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005), h. 22

<sup>24</sup> Zainudinali, *Melode Penefifian Hulaim*. Sinar grafika (Jakarta:2011), h.103

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.4**  
**Populasi dan Sample**

NO	NAMA	Populasi	Sample	Persentase
1	Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Tokoh Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu	20 Orang	5 Orang	25%

**5. Sumber Data**

a. Data primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>25</sup> Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan yaitu Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu, ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

**6. Data sekunder**

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdapat dalam penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini selain itu juga dapat dipergunakan

<sup>25</sup> Soeriono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: DI Press, 2012), h..12.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut nama situsnya.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kliping, Surat kabar maupun eksilopedi.

**7. Teknik pengumpulan data**

- a. Observant yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya.<sup>26</sup>
- b. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber.<sup>27</sup>
- c. Studi Pustaka, yaitu peneliti mencari data melalui jurnal, buku-buku refrensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen – dokumen amok melengkapi data-data yang penulis teliti.

**8. Metode Analisa data**

Dalam Metode Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan tentang tugas wakil

<sup>26</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, (Jakarta : 2010), h.26

<sup>27</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bupati, hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam membantu bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah yang mana berpatokan kepada Rumusan Masalah yang penulis buat.

**9. Metode Penulisan**

- a. Deskriptif, yakni menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yakni mengemukakan data –data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditank kesimpulan yang bersifat khusus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Kabupaten Labuhan Batu

##### 1. Sebelum Zaman Penjajahan Belanda

Sistem Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari-hari (semacam Perdana Menteri).<sup>28</sup>

Selanjutnya di bawah Bendahara Sri Paduka Maharaja ada Tumenggung yang menjadi Jaksa merangkap Kepala Polisi. Kemudian ada Laksamana yaitu Panglima. Angkatan Laut / Panglima Perang Di bawah Laksamana ada Hulu Balang atau Panglima Angkatan Darat kemudian ada pula Bentara kanan bertugas sebagai Ajudan Sultan dan Bentara kiri yang menjadi Penghulu Istana, dan Penghulu Para Bangsawan.

Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri 4 kesultanan yaitu :

- a. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang
- b. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir
- c. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama
- d. Kesultanan Parial berkedudukan di Labuhan Bilik

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditambah I Half-bestuur, yaitu Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung Medan.

## 2. Zaman Penjajahan Belanda

Secara pasti tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan yang dihimpun diperoleh keterangan bahwa Belanda, masuk ke Labuhanbatu berkisar Tahun 1825. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (berkisar Tahun 1831).<sup>29</sup>

Pada Tahun 1862 kesatuan Angkatan Laut Belanda di Bawah Pimpinan “BevelHebee” datang ke Kampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui Sungai Barumon. Di Kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membuat tempat pendaratan dari batu beton. Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/ persinggahan Kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah Kampung (Desa) yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Batu”, akhirnya nama Pelabuhan Batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda secara juridis formal menetapkan *Gouverment Bisluit* Nomor 2 Tahun 1867 tertanggal 30 September 1867 tentang pembentukan *Afdeling* Asahan yang meliputi 3 *Onder Afdeling* yaitu :

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Onder Afdeling* Batu Bara dengan Ibu Kota Labuhan Ruku
- b. *Onder Afdeling* Asahan dengan Ibu Kota Tanjungbalai.
- c. *Onder Afdeling* Labuhanbatu dengan Ibu Kota Kampung Labuhanbatu.

Dengan demikian secara administratif pada mulanya Pemerintahan Wilayah Labuhanbatu adalah merupakan bagian dari Wilayah *Afdeling* Asahan. Pada masa itu *Afdeling* dipimpin oleh seorang Asisten *Residers* (Bupati), sedangkan *Onder Afdeling* di Pimpin oleh seorang *Controleur* (Wedana).

*Controleur* Labuhanbatu pertama Kali berkedudukan di Kampung Labuhanbatu kemudian pada Tahun 1895 dipindahkan ke Labuhan Bilik. Tahun 1924 dipindahkan ke Marbau, Tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batu dan pada Tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapat sampai Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 kedudukan *Controleur* tetap di Rantauprapat.

### 3. Zaman Penjajahan Jepang

Pada Tahun 1942 bale tentara Dai Nippon (Jepang) menduduki seluruh Wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1942 Tentara Jepang mendarat di perupuk (Tanjung Tiram). Dari Perupuk sebahagian Tentara Jepang tersebut melanjutkan gerakan Pasukan untuk merebut Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya Kota Medan. Dan sebahagian lagi bergerak ke Wilayah Tanjungbalai yang pada saat itu sebagai Pusat Pemerintahan *Afdeling* Asahan. Dari Asahan (Tanjung Balai) selanjutnya ke Wilayah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Labuhanbatu untuk merebut Kota Rantauprapat.<sup>30</sup>

Pada masa penjajahan Jepang Sistem Pemerintahan Hindia Belanda dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan Zelf Bestuur dan kekuasaan Sultan/Raja berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyuco.

Di samping itu istilah-istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan diganti dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang, antara lain :

- a. Keresidenan diganti dengan Syuu dan Kepalaanya disebut dengan Syuu- cooan.
- b. *Regenschap* (Kabupaten) diganti dengan Ken dan Kepalaanya disebut Ken- coo.
- c. *Stadgementhe* (Pemerintah Kota) diganti dengan Si dan Kepalaanya disebut Si-coo.
- d. Kampung/Desa disebut dengan Ku dan Kepalaanya disebut dengan Ku-coo.

**4. Setelah Proklamasi**

Kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya, yaitu Jepang menyerah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945 telah memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk merdeka sebagai bangsa yang berdaulat.

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam Sidangnya tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dicapai kesepakatan pembagian Wilayah Republik Indonesia dalam 8 Propinsi masing-masing, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil dan Maluku. Provinsi dibagi dalam Keresidenan yang dikepalai oleh Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah, sedangkan kedudukan Kota (*Gemeente*).

Pada tanggal 2 Oktober 1945 Mr. Teuku Muhammad Hasan diangkat menjadi Gubernur Sumatra yang kemudian pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Sumatra mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang mana pada saat itu diwakili oleh utusan-utusan daerah yang mana sesampainya di daerah masing-masing bersama dengan pemuka masyarakat membentuk Komite Nasional Daerah (KND) Labuhanbatu pada tanggal 17 Oktober 1945 yang sekaligus meresmikan adanya Kabupaten Labuhanbatu yang mana Kepala Pemerintahannya dipimpin oleh Abdul Rahman dan Dr. Hidayat Sebagai Wakil Kepala Pemerintahan pertama yang selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera pada tanggal 26 Juni 1946 yang ditandatangani di Pematang Siantar dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1946. Dengan demikian istilah Bupati mulai digunakan adalah sejak tanggal 1 Juli 1946 di Labuhanbatu.<sup>31</sup>

Adapun nama-nama Bupati Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sejak tanggal 17 Oktober 1945 sampai dengan sekarang sebagai berikut :

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

**Tabel II.1**  
**Nama-Nama Bupati Kabupaten Labuhanbatu**

No	Nama Bupati	Priode
1.	Abdul Rahman	(17 Oktober 1945 – 30 Juni 1946)
2.	Gauss Gautama	(1946 – 1947)
3.	Syahbuddin Siregar (PJ)	(1947 – 1948)
4.	Djamaluddin Tambunan	(1948 – 1951)
5.	Abdul Wahid Er	(1951 – 1954)
6.	Ibnu Saadan	(1954 – 1956)
7.	T. Badja Purba	(1956 – 1958)
8.	Fachruddin Nasution	(1958 – 1959)
9.	Yahya Yakub	(1959 – 1961)
10.	H. Idris Hasibuan	(1961 – 1966)
11.	H. Iwan Maksum	(1966 – 1974)
12.	H. Asrol Adam	(1974 – 1979)
13.	H. Djalaluddin Pane	(1979 – 1984)
14.	Abdul Manan	(1984 – 1989)
15.	H. Ali Hanafiah	(1989 – 1994)
16.	Drs. H.B. Ispensyah Rambe	(1994 – 1999)
17.	Drs. Hr. Hadisiswoyo Al Haj	(1999 – 2000)
18.	H.T. Milwan	(2000 – 2005)
19.	Syaparuddin, SH	-2005
20.	H. T. Milwan	(2005 – 2010)
21.	Dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.Pd,	(2010 – 2015)
22.	H. Pangonal Harahap, S.E.,M.Si	(2016 – 2018)

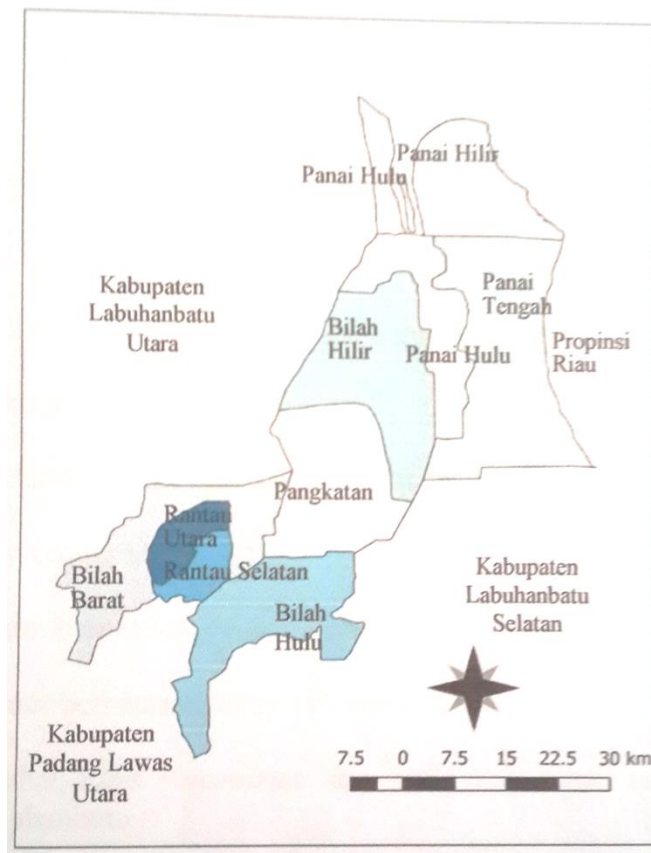
## B. Letak Geografis dan Demografis

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Rantauprapat karena terjadi pemekaran daerah pada tanggal 24 Juni 2008, maka Labuhanbatu dibagi menjadi 3 kabupaten yaitu Labuhanbatu Utara dengan ibukota Aek Kanopan, Labuhanbatu Induk ibukotanya Rantau Prapat, dan yang terakhir Labuhanbatu Selatan dengan ibukota Kota Pinang yang mana Kabupaten Labuhanbatu mempunyai luas wilayah 21-5362,01 km<sup>2</sup>.<sup>32</sup>

Berikut Peta Wilayah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu setelah adanya Pemekaran Tahun 2008 :

<sup>32</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Labuhanbatu terkenal dengan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet. Wilayah kabupaten yang dilalui tiga sungai besar, yaitu Sungai Bilah, Sungai Kualuh, dan Sungai Barumun merupakan daerah yang subur. Hal ini dapat dilihat dari 58 persen wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, dimana di dalamnya didominasi subsektor perkebunan.<sup>33</sup>

Kabupaten Labuhanbatu terletak di antara 1°41' – 2°44' Lintang Utara dan 99°33' – 100°22' Bujur Timur dengan ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Labuhanbatu 2.561,38 Km<sup>2</sup> (256.138 Ha). Letak Wilayah Kabupaten Labuhanbatu berada pada kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera. Selain itu juga mempunyai posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalur antar provinsi dan berada dipersimpangan antara

<sup>33</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu



Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas Utara
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau.

Berikut Tabel Luas Kecamatan dan rasio kecamatan terhadap luas Kabupaten Labuhanbatu :

**Tabel II.2**  
**Luas Kecamatan dan Rasio Kecamatan terhadap luas Kabupaten Labuhanbatu**

No	Nama Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Bilah Barat	293,23	11,45
2.	Bilah Hilir	355,47	13,88
3.	Bilah Hulu	202,98	7,92
4.	Panai Hilir	430,83	16,82
5.	Panai Hulu	276,31	10,79
6.	Panai Tengah	483,74	18,89
7.	Pangkatan	342,03 3	13,35
8.	Rantau Selatan	64,32	2,51
9.	Rantau Utara	112,47	4,39
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>2561,38</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

Wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari kawasan pantai dan kawasan non pantai. Kawasan Pantai terletak di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Panai Tengah, Panai Hilir dan Kecamatan Panai Hulu, yang ketiganya dapat ditempuh melalui jalur transportasi darat dan air. Sedangkan Kawasan Non Pantai terletak di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Bilah Barat, Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Hulu, Pangkatan dan Kecamatan

Bilah Hilir. Pada kawasan non pantai terdapat kawasan perbukitan yaitu di Kecamatan Bilah Barat dan Kecamatan Rantau Utara, yang merupakan ibukota kabupaten. Kabupaten Labuhanbatu tidak memiliki kawasan pedalaman, kawasan terpencil, kawasan pegunungan dan kawasan kepulauan.

Menurut klimatologi wilayah Kabupaten Labuhanbatu termasuk kawasan tropis dengan iklim di Kabupaten Labuhanbatu secara umum rata-rata temperatur 22,50 C dengan suhu maksimum 330 C dan suhu minimum 210 C. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Labuhanbatu didominasi pada bulan Januari, September dan Oktober seperti halnya wilayah lain di Pulau Sumatera. Selama tahun 2018, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 11,64 hari per bulan dengan rata-rata curah hujan 166,16 MM per bulan. Sedang keadaan musimnya terbagi kepada dua yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kabupaten Labuhanbatu dengan potensi luas wilayah yang didukung oleh heterogenitas penduduk yang terdiri dari berbagai suku, ras dan agama sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas hubungan, keharmonisan dan toleransi yang tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018 berjumlah 462.191 dengan kepadatan penduduk sebesar 180 jiwa per Km<sup>2</sup>

Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.3**  
**Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018**

No	Nama Kecamatan	Penduduk	Persentase %
1.	Bilah Hulu	61.842	11,45
2.	Pangkatan	33.404	13,88
3.	Bilah Banat	38.378	7,92
4.	Bilah Mlir	52.095	16,82
5.	Panai Hulu	37.563	10,79
6.	Panai Tengah	38.138	18,89
7.	Partail-1111ir	37.222	13,35
8.	Rantau Selatan	70.560	2,51
9.	Rantau Utara	92.989	4,33 9
<b>JVUMLAH/ TOTAL</b>		<b>462.191</b>	<b>100,00</b>

Sumber : *Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu*

Untuk keberagaman Kabupaten Labuhanbatu memiliki keanekaragaman budaya, suku dan agama. Keanekaragaman ini merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi toleransi yang lulus dan terpelihara oleh masyarakat berdampak terhadap pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan Jumlah Penduduk Tahun 2018 etnis terbesar yang ada di Kabupaten Labuhanbatu adalah suku batak (Kara, Pakpak, Tapanuli/Toba, dan Mandailing) sebesar 44,43%, kemudian suku yang berasal dari Jawa (Betawi, Banten, Sunda, Jawa dan Madura) sebesar 40,51%, Melayu sebesar 8,18% Minang sebesar 0,96%, Aceh sebesar 0,25%, dan lainnya sebesar 5,67%.

Jumlah Populasi Suku dan Populasi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut per Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel II.4**  
**Populasi Suku Bangsa Menurut Kecamatan Tahun 2018<sup>35</sup>**

No	Kecamatan	Suku Bangsa					Lainnya
		Batak	Melayu	Minang	Jawa	Aceh	
1.	Bilah Hulu	32,58	0,41	0,74	61,68	0,19	4,40
2.	Bilah Barat	56,71	0,15	0,20	41,69	0,05	1,20
3.	Bilah Hilir	38,21	8,14	0,93	46,97	0,24	5,51
4.	Panai Hilir	47,11	19,20	<b>2,11</b>	18,50	0,55	12,53
5.	Panai Hulu	29,99	10,83	0,60	54,87	0,16	3,55
6.	Panai Tengah	39,46	29,82	0,62	26,27	0,16	3,67
7.	Pangkalan	45,51	0,94	0,58	49,35	0,15	3,47
8.	Rantau Selatan	59,66	1,82	0,60	34,18	0,16	3,58
9.	Rantau Utara	50,72	2,36	2,22	30,99	0,57	13,14
<b>JUMLAH</b>		<b>44,43</b>	<b>8,18</b>	<b>0,96</b>	<b>40,51</b>	<b>0,25</b>	<b>5,67</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

**Tabel II.5**  
**Populasi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut per-Kecamatan Tahun 2018**

No	Kecamatan	Agama					Lainnya
		Islam	Kristen	Khatolik	Budha	Hindu	
1.	Bilah Hulu	83,19	12,37	3,13	0,98	0,26	0,07
2.	Bilah Barat	95,45	3,05	1,38	0,08	0,03	0,01
3.	Bilah Halir	75,49	20,06	4,10	0,06	0,03	0,26
4.	Panai Hilir	81,34	11,10	2,88	4,53	0,15	-
5.	Panai Hulu	95,28	3139	1,15	0,17	0,01	-
6.	Panai Tengah	83,23	13,70	2,61	0,45	-	0,01
7.	Pangkalan	70,86	23,69	4,95	0,18	0,02	0,30
8.	Rantau Selatan	90,33	8,37	0,65	0,55	0,07	0,03
9.	Rantau Utara	79,99	11,82	1,64	6,38	0,13	0,04
<b>JUMLAH</b>		<b>83,91</b>	<b>11,95</b>	<b>2,49</b>	<b>1,49</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

Dilihat dari kerukunan mat beragama menunjukkan bahwa penduduk Labuhanbatu paling banyak memeluk agama Islam yakni sebesar 83,91% diikuti oleh agama Kristen sebesar 11,95%, Katolik sebesar 2,49%, Budha sebesar 1,49%, Hindu sebesar 0,08% dan lainnya

<sup>35</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

sesebar 0,08%. Kerukunan umat beragama sudah suatu keharusan dipelihara sehingga berdampak positif terhadap kestabilan dan kemajuan di Kabupaten Labuhanbatu.

### C. Visi Dan Misi

#### Visi

Terwujudnya Labuhanbatu yang memiliki satu tekad bersama rakyat menuju Kesejahteraan dalam berbagai indikator pembangunan dan standard kehidupan (Satu Tekad Bersama Rakyat Menuju Sejahtera 2021, Labuhanbatu semakin Hebat Lebih berdaya)

#### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum dalam memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), mencegah tindak kriminal dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa.
- b. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK yang mempunyai integritas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri khas berbudaya Labuhanbatu, ramah, santun dan beretika.
- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau/*assurance*, terjangkau, merata dan berkeadilan sesuai dengan standart Internasional

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Membangun Perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata
- e. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.<sup>36</sup>

#### D. Kondisi pendidikan

Setiap negara maju tidak akan perah, ter;epas dengan dunia pendidikan. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu negara, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dapat memajukan dan mengharumkan negaranya. Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat, demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat bangsa tersebut.<sup>37</sup> Dalam mewujudkan pendidikan yang bagus di suatu daerah tentu keberadaan Sarana Pendidikan sangatlah penting. Adapun Sarana Pendidikan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu bisa diliat dan tabel berikut :

**Tabel II.6**  
**Sarana Pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak kanak	280
2	Madrasah Ibtidaiyah	120
3	Sekolah Dasar Sederajat	242
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	137
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir	32
6	Perguruan Tinggi	4

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

<sup>37</sup> Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya :2007), h.11.



## Kabupaten dalam angka tahun 2018

Dari Tabel yang ada diatas Sarana yang ada di Kabupaten Labuhanbatu jumlah Taman Kanak-Kanak 280 Unit, Untuk Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 20 unit, Sekolah Dasar Sederajat berjumlah 242 Unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 137 Unit, Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir berjumlah 32 Unit dan Perguruan Tinggi Ber jumlah 4 Unit.

### E. Kondisi Ekonomi

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya termasuk di Kabupaten Labuhanbatu yang mana keadaan mata pencarian Penduduk Masyarakatnya yang mana tertera dalam tabel berikut ini :

**Tabel II.7**  
**Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Perekonomian Tahun 2018**

No	Mata Pencarian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sektor Pertanian	79.009	16,24%
2	Sektor Jasa	113.109	23,25%
3	Perdagangan	1.926	0,39%
4	PNS/TNI/POLRI	7.236	1,48%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### A. Pemerintahan Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Menurut Abu Usamah adalah kewenangan sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau/area, jadi pemerintahan daerah bentuk otonomi daerah adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri . Dan Pengertian lebih luas lagi adalah wewenang pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungan.<sup>38</sup>

Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin, menjelaskan bahwa suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu negara.<sup>39</sup>

Pengertian pemerintahan pusat, penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara. Dengan kata

<sup>38</sup> Abu Samah & Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016), h. 1

<sup>39</sup> Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Alfabeta cv, 2014) ,h. 17-120.

lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Di dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.<sup>40</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 poin b menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Sedangkan dalam poin d menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan otonom oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

<sup>40</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.<sup>42</sup>

Jadi dari Pengertian yang disampaikan bahwa Pemerintah daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur sebuah penyelenggara pemerintah daerah yang menjamin adanya pelaksanaan suatu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kota dan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten

### **Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Menurut Inu Kencana Syafi'i, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan.<sup>43</sup>

Asas juga ialah suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum sebagai basic truth, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>43</sup> Inu Syafei Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h.

masyarakat masuk kedalam hukum, dan menjadi sumber kehidupan nilai-nilai etis, moral dan sosial masyarakatnya.

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.<sup>44</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.<sup>45</sup>

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut:

1. Asas persamaan adalah merupakan hukum yang paling mendasar untuk memberlakukan hal-hal yang sama tanpa ada perbedaan.

<sup>44</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.34

<sup>45</sup> Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas kepercayaan merupakan hukum yang paling mendasar pula yang menyangkut atas pemenuhan janji-janji secara yuridis, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijakan dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan), oleh karena pemerintah terikat pada janjinya, kecuali terjadi perubahan keadaan.
3. Asas kepastian hukum adalah memberikan hak bagi yang berkepentingan untuk mengetahui secara jelas dan tepat terhadap ketentuanketentuan yang terkait dalam pemerintahan.
4. Asas kecermatan adalah tindakan pemerintahan pada pengambilan suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan meneliti fakta-fakta yang relevan, kemudian memasukkan dalam pertimbangannya.
5. Asas pemberian alasan adalah suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan-alasan yang rasional, ketetapan benar, dan memberikan keyakinan yang masuk akal sehat untuk dijadikan dasarnya.
6. Asas larangan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) adalah suatu wewenang digunakan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kekuasaan (wewenang) dalam tindakan pemerintahan digunakan selain dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka terjadi penyalanggunaan wewenang. Hal ini dilarang dalam asas *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Asas larangan bertindak sewenang-wenang adalah suatu tindakan pemerintah di dalam membuat keputusan dalam kebijakan pemerintahan tidak berdasarkan atas norma-norma hukum serta kebiasaan yang berlaku. Norma hukum dan kebiasaan yang berlaku merupakan norma dasar di dalam setiap tindakan pemerintah.<sup>46</sup>

Didalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) bahwa asas dalam Pemerintahan yaitu :

1. Asas kepastian hukum adalah adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
3. Asas keterbukaan adalah adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. Asas kemanfaatan adalah asas dasar yang harus dijadikan alat uji bagi pengambil keputusan, baik keputusan lembaga lembaga administrasi Negara, maupun bagi Hakim.
5. Asas persamaan adalah merupakan hukum yang paling mendasar

<sup>46</sup> Philipus M Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajamada University Press, 2005), h. 270

untuk memberlakukan hal-hal yang sama tanpa ada perbedaan

6. Asas kecermatan adalah tindakan pemerintahan pada pengambilan suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan meneliti fakta-fakta yang relevan, kemudian memasukkan dalam pertimbangannya.
7. Asas larangan bertindak sewenang-wenang adalah suatu tindakan pemerintah di dalam membuat keputusan dalam kebijakan pemerintahan tidak berdasarkan atas norma-norma hukum serta kebiasaan yang berlaku. Norma hukum dan kebiasaan yang berlaku merupakan norma dasar di dalam setiap tindakan pemerintah.
8. Asas Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
10. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

12. Asas Profesionalitas adalah adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Asas Keadilan adalah adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<sup>47</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

#### 1. Asas Desentralisasi

Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu :

- a. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- b. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
- c. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
- d. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat

<sup>47</sup> Cekli Setya Pratiwi, dkk, *Penjelasan Umum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik* (AUP) *Administrasi Negara*, (Jakarta, 2016), h. 53



melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.<sup>48</sup>

Konsep desentralisasi sering nampak pada pembahasan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Hal ini sejalan dengan berbagai pengertian dan definisi yang dikemukakan para ahli mengenai desentralisasi. Apalagi pada saat sekarang, hampir setiap negara menerapkan konsep desentralisasi sebagai suatu asas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara kepada pemerintahan daerah.<sup>49</sup>

UNDP memberikan pengertian mengenai decentralization, yaitu; *refers to the restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility between institutions of governance at the central, regional and local levels according to the principle of subsidiarity, thus increasing the overall quality and effectiveness of the system of governance, while increasing the authority and capacities of sub-national levels.*<sup>50</sup>

Pengertian tersebut menjelaskan adanya restrukturisasi atau pengaturan kewenangan sehingga jelas implementasi tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah, sehingga sehingga dapat meningkatkan kualitas dan

<sup>48</sup> Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, ( Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011) h. 17-18.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

<sup>50</sup> UNDP, Decentralized Governance Programme: Strengthening Capacity for People-Centered Development, Management Development and Governance Division, Bureau for Development Policy, Sept 1997 <http://www.pogar.org/publications/other/undp/decentralization/decenpro97e.pdf>

keefektifan sistem pemerintahan termasuk kewewenangan dan kapasitas daerah. Desentralisasi merupakan pembagian fungsi dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi melalui asas dekonsentrasi tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara baik dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsure-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah (pusat) sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah (pemerintah daerah), untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi.<sup>51</sup>

Philipus M. Hadjon, mengemukakan: Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>51</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2010). h. 122

sebagian urusan pemerintahan<sup>52</sup>.

Bryant dan White, mengemukakan bahwa pada dasarnya memang terdapat dua bentuk desentralisasi, yaitu desentralisasi administrasi adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat ditingkat lokal; dan, desentralisasi politik yaitu wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan tujuan desentralisasi, Bagir Manan mengemukakan, ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi bertujuan meringankan beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah. Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau negara secara keseluruhan. Pusat tidak perlu punya aparat di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan. Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak ada fungsi dekonsentrasi<sup>54</sup>.

Pada implementasi asas desentralisasi di daerah, urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa juga sepenuhnya diserahkan

<sup>52</sup> *Ibid*, h.122

<sup>53</sup> Bryant dan White. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES, Jakarta hlm.213-214.

<sup>54</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), h. 187

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada pemerintah daerah, baik yang menyangkut perencanaan, penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## 2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dekonsentrasi atau desentralisasi jabatan (*ambtelike decentralisatie*) Yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintah. Misalnya pemilihan menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi yang semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur atau dibawa-bawa.<sup>55</sup>

Pengertian dekonsentrasi juga diatur dalam Undang-Undang otonomi daerah sebelumnya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, *dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah

<sup>55</sup> Hanafi Nurcholis, *Teori Dan praktek pemberitaan dan otonomi daerah*, PT. Grasindo, Jakarta 2005, hal 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto pasal 1 point 10 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>56</sup>

Jadi dari pengertian dekosentrasi yang dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan maupun para ahli yang berkaitan otonomi daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu:

- a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik

<sup>56</sup> Ahmad Sukardi, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 90

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia;

- b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah
- c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah;
- d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
- e. tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
- f. terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>57</sup>

### 3. Tugas Pembantuan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>58</sup>

Tugas pembantuan sendiri adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintahan di bawahnya seperti propinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Artinya bahwa pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan desa

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



diminta bantuannya oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berada dilingkungan pemerintahan di bawahnya, yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.<sup>59</sup>

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembagunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.<sup>60</sup>

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (beschikken). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. Amrah Muslim menafsirkan tugas pembantuan (medebewind) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>61</sup>

Sementara itu, Bagir Manan, mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (de uitvoering van hogere

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>59</sup> Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 7

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 122

<sup>61</sup> Irawan Soejito, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, hlm.117.

regelingen). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundangundangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (vorderen) dalam rangka tugas pembantuan.<sup>62</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 telah ditetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Negara Kesatuan dan bukan Negara Federasi yang mana tiap daerah tidak ada yang namanya negara bagian. Dalam pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu :

- Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal.
- Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
- Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintahan pusat pada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing.<sup>63</sup>

### 3 Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

<sup>62</sup> Bagir Manan. 1994. Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 179  
<sup>63</sup> *Ibid*, h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan
2. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.<sup>64</sup>

#### 4. Strategi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>65</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan penetapan strategi sebagai berikut :

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>65</sup> Manan, *op.cit*, h. 162



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Peningkatan pelayanan

Pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan adalah suatu hal yang bersifat esensial guna mendorong atau menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat.

#### 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah bahwa peran serta masyarakat lebih menonjol yang dituntut daerah kreatifitas masyarakat baik pengusaha, perencana, pengusaha jasa, pengembang dalam menyusun konsep strategi pembangunan daerah, di mana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi dan mediasi.

#### 3. Peningkatan daya saing daerah

Peningkatan daya saing daerah guna tercapainya keunggulan lokal dan apabila dipupuk kekuatan secara nasional akan terwujud keunggulan daya saing nasional.<sup>66</sup>

### 5. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menurut Hanif Nurcholis Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah “proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. Administrasi umum pemerintahan terdiri atas kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai, daerah, keuangan daerah dan barang daerah”.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Persatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 3

<sup>67</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.317

## B. Kewenangan

### 1. Pengertian Kewenangan

Menurut Nanang Nugraha bahwa kewenangan (Authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (Competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.<sup>68</sup>

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “Sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik.”<sup>69</sup> Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (Macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Rechtenenplichten).<sup>70</sup> Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (Zelfregelen) dan mengelola sendiri (Zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti

<sup>68</sup> Yeyet Sholihat, Nanang Nugraha, “Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Karawang”, Jurnal POLITIKOM Indonesia, Vol. 1 No.2, 2016, h. 143.

<sup>69</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 71.

<sup>70</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.

Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>71</sup>

Dalam menjalankan jabatan pemerintahank, para pejabat dilekatkan tugas dan wewenang untuk merealisasikan fungsi jabatan yang dipangkunya. Menurut Bagir Manan, agar tugas dan wewenang pejabat pemerintahan dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan hukum konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara politik, hukum dan/atau sosial, maka kepada para pejabat pemerintahan dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Tanpa adanya hak dan kewajiban yang dilekatkan pada tugas dan wewenang pejabat pemerintahan tersebut, maka tentunya segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan pemerintahan.<sup>72</sup>

## 2. Sumber- Sumber Kewenangan

Menurut Pendapat Indroharto, bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan, bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan peraturan daerah. Kemudian yang bertindak sebagai *delegated legislator* seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, dalam mana diciptakan wewenang

<sup>71</sup> Ibid, h. 72.

<sup>72</sup> Bagir Manan, *Hukum positif Indonesia : Suatu Kajian Teoritis*, (Fakultas Hukum- UII Press, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Bagir Manan II), 2004), h.66.



pemerintahan kepada badan/atau jabatan pemerintahan tertentu.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/atau jabatan pemerintahan lainnya. Jadi, suatu wewenang delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Adapun, pengertian mandat terjadi ketika organ pemerintahan menizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan yang mengatasnamakan badan/atau jabatan pemerintahan yang diwakilinya (bertindak untuk dan atas nama badan/atau jabatan pemerintahan). Hal ini sama atau serupa dengan konsep pemberian kuasa dalam hukum perdata yang memberi kewenangan pada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.<sup>73</sup>

Bagir Manan menyatakan dalam Hukum Tata Negara, “Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.”<sup>74</sup>

### 3. Pembatasan Kewenangan

Kepentingan untuk membatasi wewenang pemerintahan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemerintahan tidak lain dimaksudkan untuk mencegah agar tindakan pemerintahan tersebut tidak disalahgunakan atau

<sup>73</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Tentang Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Sinar Harapan, Jakarta, 1993) h.95.

<sup>74</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad : Bandung, 2000), h. 1-2.



menyimpang dari wewenang pemerintahan yang telah diberikan padanya.<sup>75</sup>

Sejalan dengan pendapat dari Kuntjoro Purbopranoto yang menyatakan, bahwa pembatasan tindakan pemerintah harus ada mengingat bahwa tindakan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan hukum (*Onrechtmatig*) baik formal maupun materiil dalam arti luas serta tidak boleh melampaui/menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.<sup>76</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Diluar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*Onvoegdheid*). Adanya batas wewenang tersebut memberi ruang lingkup terhadap legalitas tindakan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi. Unsur wewenang dan prosedur merupakan landasan bagi legalitas formal suatu tindakan pemerintahan. Legalitas formal tersebut memunculkan asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi *ratio legis* dengan adanya norma aturan yang menyatakan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan badan atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan pemerintah tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur dan substansi.

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan pemerintah yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah (atribusi, delegasi dan

<sup>75</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Prenadamedia Group, Jakarta :2014), h. 118-119.

<sup>76</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Alumni : Bandung, 1981), h. 43.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mandat). Adapun asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yaitu asas negara hukum, demokrasi dan instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan asas instrumental meliputi asas efisiensi atau daya guna (*doelmatigheid*) dan asas efektivitas atau hasil guna (*doeltreffendheid*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substantial, dalam arti bahwa tindakan pemerintahan dibatasi menurut aturan dasar yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan. Sebagai contoh adanya wewenang untuk menetapkan pajak bumi dan bangunan, maka secara substanti dibatasi pada luas tanah dan luas bangunan dan tidak menyangkut atau berkaitan dengan isi rumah atau bangunan tersebut. Dengan kata lain, aspek substanti menyangkut “apa” merupakan tindakan sewenang-wenang, sedangkan cacat substanti menyangkut “untuk apa” merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang.

Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. Philipus M. Hadjon menyebut dengan penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan kata lain pejabat telah melanggar asas spesialisasi. Untuk mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan, maka haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat pemerintahan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan kewenangan bukanlah suatu kealpaan. Penyalahgunaan dilakukan secara sadar, yakni mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu. Pengalihan tujuan tersebut didasarkan atas interest atau kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>77</sup>

### Good Governance

Menurut Jimly Asshiddiqie Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilakukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

#### 1. Transparansi.

Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang mudah diperoleh masyarakat. Pemerintah berinisiatif untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik melalui media elektronik, cetak, dialog dengan publik, brosur, pamflet dan lain-lain. Sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah melakukan transparansi, yakni adanya penambahan wawasan masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkat partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan berkurangnya pelanggaran hukum.

#### 2. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat mendorong bagi setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, demi untuk kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga

<sup>77</sup> Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, h. 119-122

proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan asas pemerintahan rakyat. Dengan demikian, maka pemerintah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan partisipasi aktifnya.

### 3. Akuntabilitas

Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia. Dalam tatanan pemerintah pusat, Presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan tingkat pusat menyampaikan bertanggungjawab pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada tatanan pemerintahan daerah, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memberikan pertanggungjawaban pemerintahan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi. Bupati dan Walikota memberikan pertanggungjawaban pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi, sedangkan kepada DPRD Kabupaten/Kota hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban. Walaupun masyarakat telah terwakili dalam DPRD Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai negara demokrasi, masyarakat tetap diberikan informasi pertanggungjawaban melalui berbagai sarana komunikasi yang berada di daerah baik dengan media cetak, elektronik dan lain-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain.<sup>78</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Tugas Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wakil kepala daerah mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban. Adapun tugas wakil kepala daerah dalam pasal 66 yaitu :

1. Wakil Kepala Daerah mempunyai Tugas dan Kewenangan :
  - a. Membantu Kepala Daerah dalam urusan :
    1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
    2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
    3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
    4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan

<sup>78</sup> Jimli Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2011) h. 101



d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
4. Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 66 Tentang pemerintahan Daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati dalam membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu tidak terlaksana pada priode 2016-2018 bahwasanya Tugas Wakil Bupati hanya terlaksana 1 Tahun pertama saja setelahnya Tugas dan kewenangan Wakil Bupati dalam membantu Bupati memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Labuhanbatu, memberikan saran dan menemani bupati dalam rapat dan kegiatan diluar tidak lagi diberikan dan terlaksana.
2. Hambatan dan Masalah dalam pelaksanaan tugas Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu periode 2016-2018 dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah 1) Kepala Daerah sangat minim memberikan kewenangan dan lemahnya Posisi wakil Bupati dalam pemerintahan, 2) Kurang baiknya Hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, 3) Tidak adanya ketegasan soal Pembagian Kewenangan Tugas Bupati dan Wakil Bupati.

## B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Wakil Kepala daerah dapat terlaksana lebih baik kedepan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seorang Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang seharusnya ketika menjadi pemimpin disuatu daerah harus memahami tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan juga pemimpin yang memahami tugas nya dalam manajemen pemerintahan maka tentunya akan meminimalisir terjadinya disharmoni dalam kepemimpinan dikarenakan minimnya kinerja salah satu pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada di tiap daerah hal ini berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Aturan mengenai Pembagian Tugas bupati dan wakil bupati harus lebih dipertegas dan detailkan lagi mengenai tugas masing-masing sampe di tingkat daerah melalui Surat Keputusan Bupati mengenai Tugas-tugas Wakil Bupati agar lebih terjalan dengan baik sesuai dengan kontrak politik ketika di awal pencalonan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abu Samah & Ali Bi Embi, 2016, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, Pekanbaru.
- Ahmad Sukardi, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta : Prenadamedia Group)
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Alfabeta cv)
- Basrowi dan suwandi, 2008, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta, Pustaka)
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*, (Fakultas Hukum UII Press: Yogyakarta (Selanjutnya disebut Bagir Manan II))
- Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan kota dalam rangka Otonomi Daerah* (Fakultas Hukum Unpad: Bandung)
- Burhan Ashshofa.2010. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Cekli Setya Pratiwi, dkk, 2016, *Penjelasan Umum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) Administrasi Negara*, Jakarta.
- C.S.. Kansil. 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Bryant dan White, 1987, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa Rusyanto L. Simatupang, ( Jakarta: LP3ES)
- Gempur santoso.2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Jakarta: Prestasi Pustaka)
- Hanafi Nurcholis, 2007, *Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah*, , Jakarta: PT.Grasindo)
- Haris Sabandono. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Indro Harto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Usaha Negara*, Buku II, (Sinar Harapan: Jakarta)

1. Inu Syafei Kencana, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta)
2. Irawan Soejito, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (Jakarta: Bina Aksara,)
3. Jazini Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, ( Jakarta: Prestasi Pustaka)
4. Jimmy Asshiddiqie, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers)
5. J. Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika).
6. Lexy L. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya)
7. Mahud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta)
8. Nimatul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
9. Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media)
10. Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung)
11. Pamudji S. 1994. *"Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. IIP Jakarta: Widyapraja No. 19, Tahun III.
12. *Panduan Penyusunan Skripsi*. 2014. (Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau)
13. Philipus M Hadjon, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
14. Soerono Soekamto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press)
15. Suhairizal. 2011. *Pemilihan Kepala Daerah: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada)
16. Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R& D*. (Bandung: Alfabeta)
17. Titik Triwulan Tutik, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher)
18. Zairuddin ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar grafika)



## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## Jurnal

Helmi. 2017. Artikel, Rivalitas dan Konflik Kepentingan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Catatan Akhir Tahun (Hukum dan Politik), Harian Jambi Ekspres edisi 31 Desember 2017

Robert Antony S., 2014, DISHARMONISASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA PERIODE 2008 – 2013, Medan, Neliti Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sumatera Utara

Wilda Prihatiningtyas. 2018. "Konstitusionalitas model pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA)", Jurnal Universitas Airlangga Media Luris Vol.1 No2.

Yeyet sholihat. 2016. "Reposisi Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Karawang". Jurnal Ilmiah Politikom Indonesiana Volume 1 Nomor 2.

## Situs

<http://www.rakyatpos.com/retaknya-kepemimpinan-kepala-daerah-wakil-kepala-daerah.html/>

UIN SUSKA RIAU



## LAMPIRAN

### “Dokumentasi Penelitian Wawancara”



**Gambar 1. di Kesbangpol Sumatra Utara**



**Gambar 2. Bersama Wakil Bupati Labuhanbatu Priode 2016-2018 Bapak  
Andi Suhaimi Dalimunthe, ST., MT. di Kantor Bupati Labuhanbatu**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 3. Bersama Bapak H. Dahlan Bukhari selaku Ketua DPRD**

**Labuhanbatu**



**Gambar 4. Bersama Bapak H. Ramlan Ritonga selaku Tokoh Masyarakat**

**Labuhanbatu**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 5. Bersama Bapak H. Pontas Harahap selaku Tokoh Masyarakat Labuhanbatu**



**Gambar 5. Bersama Bapak H. Randi Fitra Yana, Lc., M.Hi. selaku Tokoh Masyarakat Labuhanbatu**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 6. Bersama Bapak H. Poltak Marsada Rambe selaku Tokoh Masyarakat Labuhanbatu**



**Gambar 7. Bersama Bapak Drs. H. Amran Siregar selaku Tokoh Masyarakat Labuhanbatu**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul ***"Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati Dalam Membantu Bupati Menyelenggarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016- 2018")***, yang ditulis oleh :

Nama : Sayyid Amal Fadhli LR  
NIM : 11527104229  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 April 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Alpi Syahrin, SH., MH**

Penguji I  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji II  
**Peti Firmansyah, SH., MH**

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/33164  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Tanggal 15 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	Sayyid Amal Fadhli LR
2. NIM / KTP	11527104229
3. Program Studi	ILMU HUKUM
4. Jenjang	S1
5. Alamat	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	<b>PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI DALAM MEMBANTU BUPATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 DI KABUPATEN LABUHANBATU PERIODE 2016-2018</b>
7. Lokasi Penelitian	KANTOR BUPATI LABUHANBATU, SUMATERA UTARA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Juni 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara  
 Up. Kab. Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhikmat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 361 Telepon 4524894 - 4557009 - 4527480

Fax. (061)4153148 Medan 20119

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070-1/32/BKB.P/II/2020

Keciptaan milik UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang

2. Menumbang

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
- c. Surat Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN - RISET/33164 Tanggal 18 Juni 2020 Perihal Rekomendasi Penelitian.

## MEMBERITAHUKAN BAHWA

- a. Nama : Sayyid Amal Fadhlil I.R
- b. Alamat : Pekanbaru
- c. Pekerjaan : Mahasiswa
- d. Nip/Nim/KTP : 11527104229
- e. Judul : Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati Dalam Membantu Bupati Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 di Kabupaten Labuhan Batu Periode 2016-2018
- f. Lokasi/Daerah : Kabupaten Labuhan Batu
- g. Lamanya : 3 (Tiga) Bulan
- h. Peserta : Sendiri
- i. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

3. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan Survey/ Riset/ Penelitian/ KKN dimaksud dengan catatan, yang bersangkutan diwajibkan mematuhi Ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
- a. Untuk pengawasan surat izin yang yang di keluarkan oleh Balitbang Provsu kami diberi tembusannya
- b. Yang bersangkutan diwajibkan mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum di daerah setempat
- c. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peneliti, penelitian diwajibkan melaporkan hasilnya ke Bakesbangpol Provsu
4. Apabila ketentuan dimaksud pada butir b tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka rekomendasi ini tidak berlaku
5. Demikian Rekomendasi Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengurusan Ijin Penelitian.

Medan 23 Juni 2020

An. KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA UTARA  
KABID PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL,

BUDIANTO TAMBUNAN, SE, MSI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640526 199803 1 002

## Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Utara (Sebagai laporan)
2. Bupati Labuhan Batu Up. Ka Badan Kesbangpol
3. Ka Balitbang Provsu
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Pertanggung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. WR. SUPRATMAN NO. 48 TELP. ( 0624 ) 21113-113

RANTAUPRAPAT

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1480/BKBP-III/2020

- Membaca : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 070-1132/BKBP/III/2020 perihal Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.  
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : Proposal Penelitian Ybs.

## MEMBERITAHUKAN BAHWA

- Peserta : **SAYYID AMAL FADHLI LR**  
Alamat : Jl. Pendidikan Blok A No. 1 Riau Purwodadi Sejahtera, Pekanbaru.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Judul Penelitian : **"Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Wakil Bupati dalam Membantu Bupati Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 di Kabupaten Labuhanbatu Periode 2016-2018"**.
- Tempat Penelitian : Kantor Bupati Labuhanbatu.  
Lamar ya Penelitian : 3 Bulan  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.  
Maksud dan Tujuan : **Riset**

Akan melaksanakan Penelitian dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Bagian Umum Setdakab Kabupaten Labuhanbatu, dengan merujuk Surat Rekomendasi ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila telah selesai melakukan kegiatan penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Labuhanbatu.
5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.



- Tembusan :
1. Bapak Bupati Labuhanbatu.
  2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu.
  3. Kepala Bagian Umum Setdakab Kabupaten Labuhanbatu
  4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Riau Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.